PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

RENCANA KERJA TAHUN 2023

DPMPTSP

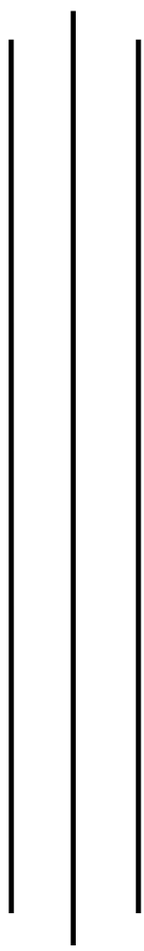
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

dpmptsp@sragenkab.go.id
dpmptsp.sragen@gmail.com

0271 892348
0271 8961359

www.dpmptsp.sragenkab.go.id

RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen Tahun 2023.

Renja ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Dalam Renja DPMPTSP Tahun 2023 ini, dijabarkan berbagai rencana program dan kegiatan yang telah disesuaikan guna mengakomodir tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.

Semoga rencana kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan di dalam pencapaian kinerja perangkat daerah.

Sragen, Juni 2022

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 27
2.5. Penelaahan Usulan dan Program/Kegiatan Masyarakat ... 37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 38
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 40
3.3. Program/ Kegiatan/ Subkegiatan 41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 49
BAB V PENUTUP 60

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1	Bagan Alur Renja SKPD	3
Gambar 1.2	Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	4
Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra	11
Tabel II.2	Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan	22
Tabel II.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP	41
Tabel III.2	Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 dan Prakiraan Maju 2024	41
Tabel III.3	Rancangan Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023	44
Tabel IV.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Sragen	50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

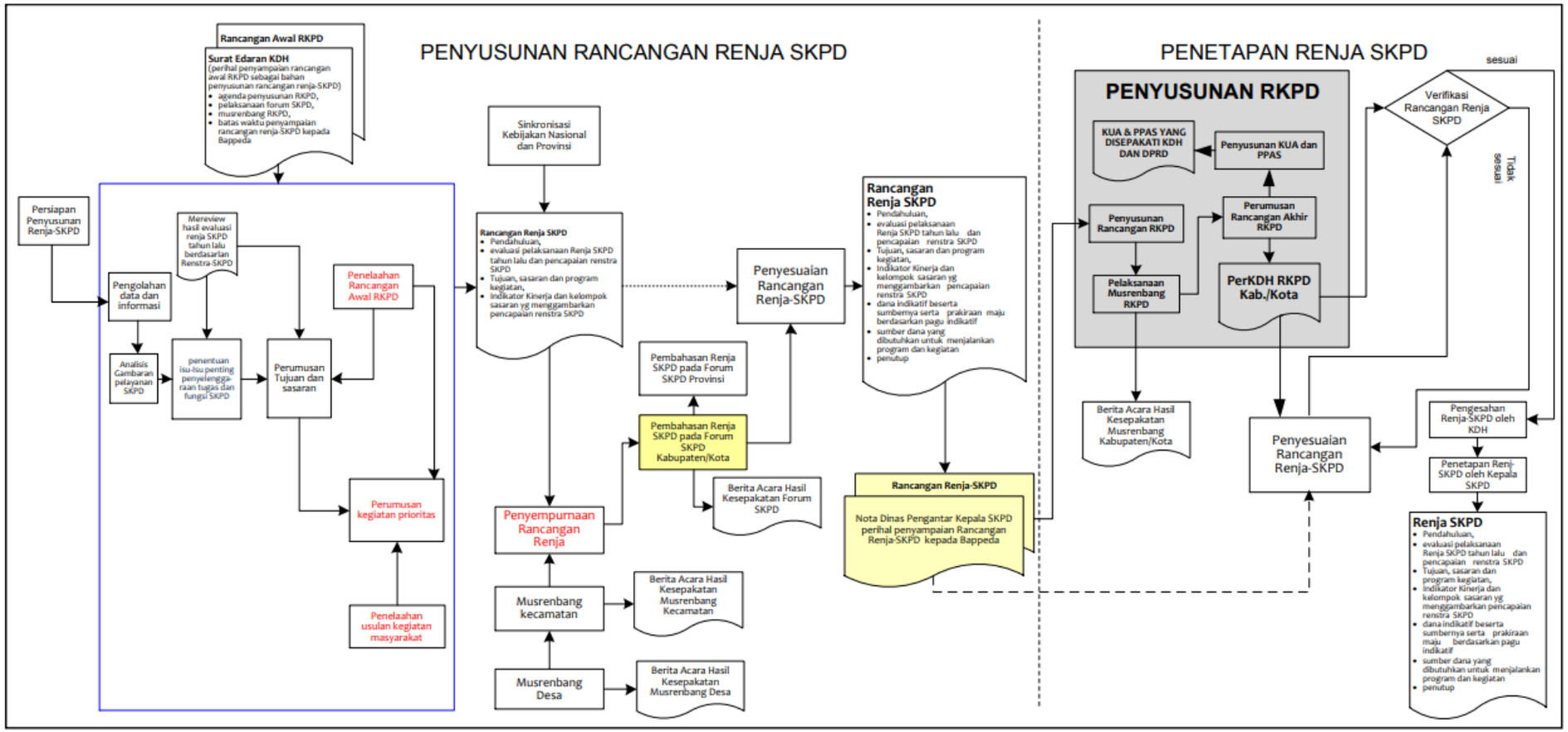
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Tahun 2023 adalah tahun kedua periode RPJMD Bupati terpilih, maka penyusunan renja sebagai dokumen perencanaan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2023. Renja ini memuat program dan kegiatan sebagai pedoman untuk memberikan arah-arah pedoman terhadap semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2023. Renja ini disusun berdasarkan kondisi pelayanan saat ini, sehingga nantinya rencana kerja yang disusun dapat tercapai dengan kondisi yang diharapkan. Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi renja disesuaikan dengan renstra.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.

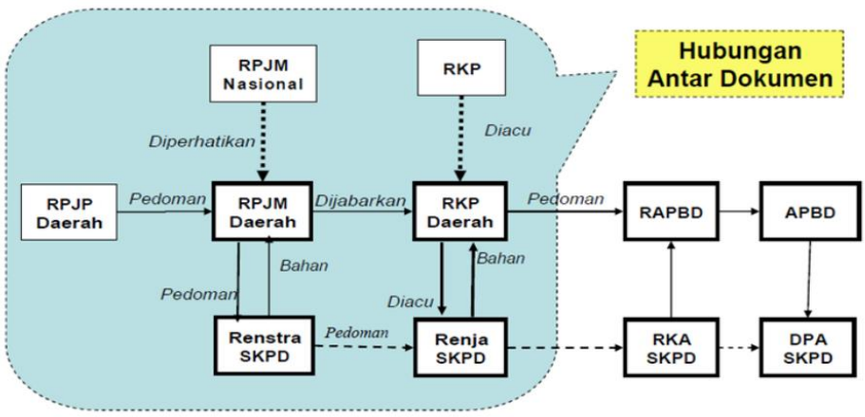
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja merupakan dokumen program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana.



Gambar 1.1

Bagan alur penyusunan renja

Renja sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan penyhusunan rencana kerja dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2.Landasan Hukum

Penyusunan renja tahun 2023 didasarkan pada :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
k. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
l. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

t. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;

u. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011–2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;

v. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;

w. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;

x. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2023 dimaksudkan ;

1. Untuk memberikan arahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2023 yang akan dibiayai dengan APBD dan sumber-sumber biaya lainnya.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama tahun 2023 yang mencakup rencana capaian kinerja, untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan perubahan renja DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2023 adalah ;

1. Sebagai landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan, berdasarkan isu-isu aktual/strategis yang dihadapi.
3. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan Latar Belakang

1.1 Landasan Hukum
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Sepanjang tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu :

1. Pelaksanaan promosi atau pameran investasi yang dilaksanakan sebanyak 2 even promosi. Pelaksanaan even promosi ini dilaksanakan di Surakarta berupa pameran investasi dan di Semarang dalam bentuk Forum Bisnis *Central Java Investment Buisness Forum* (CJIBF). Dua even tersebut adalah salah satu upaya memperkenalkan potensi investasi yang ada di Kabupaten Sragen, termasuk sektor investasi yang potensial untuk dikembangkan. Dengan adanya even promosi ini diharapkan mampu membuka pasar potensial bagi produk-produk Kabupaten Sragen untuk dipasarkan di luar Sragen.
2. Sebagai upaya peningkatan jumlah investor yang menanamkan modal di Kabupaten Sragen, juga melakukan upaya peningkatan pelayanan perizinan/nonperizinan, sosialisasi tentang perizinan dan nonperizinan yang dilakukan ke seluruh wilayah Kabupaten Sragen secara bertahap. Dengan peningkatan kegiatan-kegiatan tersebut di atas jumlah investor diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah investor pada tahun 2021 yang menanamkan investasinya sebanyak 6.072 investor, mengalami penurunan jumlah investor dibanding tahun 2020, dimana sebagian besar investor di tahun 2020, didominasi oleh sektor

UMKM. Namun dari realisasi investasi meningkat sebesar menjadi Rp. 2,1 trilyun rupiah naik sekitar 6,7% dari realisasi tahun sebelumnya (2021) yaitu Rp. 1,9 trilyun.

3. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya perizinan/ nonperizinan maka dilakukan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan pemegang perizinan terhadap ketentuan perizinan dan nonperizinan. Sepanjang tahun 2021 perizinan yang dilakukan pengawasan sebanyak 190 izin dari target 140 izin, meningkat dibanding tahun 2020 sebanyk 145. Pengawasan dilakukan guna meningkatkan tertib administrasi perizinan guna meningkatkan iklim investasi yang sehat.
4. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditujukan kepada pelaku usaha/ pengguna layanan, dimana hasil dari penilaian akan menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, khususnya aparatur pelayaan perizinan dan nonperizinan. Pelaksanaan survei berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Responden ditetapkan berdasarkan Tabel Morgan jumlah responden 354 dengan indeks **82,69** pada Semester I dan jumlah responden 317 dengan indeks **86,50** pada Semester II yang diklasifikasikan sebagai mutu pelayanan **Baik** atau bernilai **B**.
5. Dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta untuk mempermudah akses dalam pelayanan secara *online*, maka disusun aplikasi pelayanan perizinan dan nonperizinan secara *online* non OSS yang merupakan pengembangan dari aplikasi SiPIONER (Sistem Perizinan Online Sragen). Jenis perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan secara online telah mencapai 86% dan diharapkan tahun-tahun ke depan seluruh layanan perizinan dan nonperizinan dapat dilayani secara *online* baik OSS maupun non OSS.

Indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen dalam Renstra Tahun 2016-2021 sejumlah 5 (lima) indikator seluruhnya tercapai melebihi

dari target yang ditetapkan. Realisasi capaian kinerja dari 5 (lima) indikator tersebut sebagai berikut:

1) Indikator **jumlah investor,** capaian kinerja ini sebesar 6.702 dari target 1.785 (304%). Hal ini cukup membanggakan ditengah kondisi perekonomian nasional dan regional yang dinilai *stagnan* mengingat pertumbuhan ekonomi 3,69 % (BPS, 2022).
2) Indikator **jumlah perizinan yang dilakukan pengawasan,** sebesar 190 izin dari target 140 izin (135%). Di tengah kondisi wabah pandemi covid-19, pengawasan tetap dijalankan secara intensif.
3) Indikator **% perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan secara online,** sebesar 86% dari target 80%. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka cakupan jenis layanan perizinan dan nonperizinan non OSS semakin menurun, namun demikian perlu ditingkatkan cakupan layanan perizinan dan nonperizinan secara online.
4) Indikator **jumlah pameran dalam satu tahun,** telah tercapai 2 (dua) kali, melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 2 kali (100%).
5) Indikator **indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan dan nonperizinan,** juga telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja tahun 2021 IKM sebesar 86,50 dari target 82,00 (105%)

b. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target 100% sejumlah 1 indikator, yaitu **jumlah pameran dalam satu tahun** sedangkan indikator yang mlebihi 100% sejumlah 1 indikator, yaitu **indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan dan nonperizinan.**

Tabel. II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan (Renstra 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran**			100 %	100 %	100 %			
18.1.2.01	**Kegiatan Rencana dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun**			4 dok	4 dok	100 %			
18.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan			3 dok	3 dok	100 %			
18.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen laporan kinerja			1 dok	1 dok	100 %			
18.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan setiap bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah**			14 bl	14 bl	100 %			
18.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN			14 bl	14 bl	100 %			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian setiap bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah			12 bulan	12 bulan	100 %			
18.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas dan atribut			0 stel	0 stel	0 %			
18.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan latihan sesuai tugas fungsinya			0 org	0 org	0 %			
18.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi			0 org	0 org	0 %			
18.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis			35 org	35 org	100 %			
18.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran setiap bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**			12 bl	12 bl	100 %			
18.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik			12 bl	12 bl	100 %			
18.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan perlengkapan kantor jumlah unit penyediaan peralatan kantor			12 bl	12 bl	100 %			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makan minum pegawai jumlah bulan penyediaan makan minum rapat dan tamu			12 bl	12 bl	100 %			
18.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan			12 bl	12 bl	100 %			
18.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 bl	12 bl	100 %			
18.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan belanja perjalanan dinas luar			12 bl	12 bl	100 %			
18.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa penataausahaan arsip			0 bl	0 bl	0 %			
18.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan aplikasi			0 bl	0 bl	0 %			
18.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan**			0 laporan	0 laporan	0 %			
18.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor			2 unit	2 unit	100 %			
18.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor lainnya			2 unit	2 unit	100 %			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1.2.07	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan**			12 bulan	12 bulan	100 %			
18.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat			12 bl	12 bl	100 %			
18.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik			12 bl	bl	0 %			
18.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor			12 bl	bl	0 %			
18.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga harian lepas			12 bl	bl	0 %			
18.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan**			12 bl	12 bl	100 %			
18.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas jumlah unit penyediaan belanja pajak kendaraan dinas			12 bl	12 bl	100 %			
18.1.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan pemeliharaan mebel kantor			12 bl	12 bl	100 %			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung lainnya			12 bl	12 bl	100 %			
18.2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM**	**Jumlah investor**			1785 investor	6072 investor	340 %			
18.2.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah investor**			1786 investor	6073 investor	340 %			
18.2.2.01.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen fasilitas/insentif penanaman modal			1 dok	1 dok	100 %			
18.2.2.01.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Monitoring dan evaluasi			0 keg	0 keg	0 %			
18.2.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah investor**			0 dok	0 dok	0 %			
18.2.2.02.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pedoman penanaman modal			0 dok	0 dok	0 %			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2.2.02.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Pemetaan profil umkm			0 perus	0 perus	0 %			
18.3.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah pameran dalam satu tahun**			0	0	0 %			
18.3.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	**Jumlah pameran dalam satu tahun**			2 kali	2 kali	100 %			
18.3.2.01.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Content layanan publik			2 unit	unit	0 %			
18.3.2.01.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pameran/forum investasi			2 kali	kali	0 %			
18.4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan dan nonperizinan**			82,00 poin	86,50 poin	105 %			
18.4.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan dan nonperizinan**			82,00 poin	86,50 poin	105 %			
18.4.2.01.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan OSS yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			320 pemohon	932 pemohon	291 %			
		jumlah permohonan perizinan/nonperizinan melalui perizinan online			0 pemohon	0 pemohon	0 %			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.4.2.01.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah pemenuhan komitmen OSS yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			0 NIB	0 NIB	0 %			
		jumlah pemeriksaan dan verifikasi perizinan/ nonperizinan			0 pmh	0 pmh	0 %			
18.4.2.01.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah aduan ditindak lanjuti			10 aduan	16 aduan	160 %			
		jumlah pemohon layanan konsultasi dan informasi			0 orang	0 orang	0 %			
		jumlah periode survei kepuasan masyarakat			2 kl	2 kl	100 %			
18.4.2.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Fasilitasi perizinan umkm			0 org	0 org	0 %			
18.5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Jumlah perizinan yang dilakukan pengawasan			140 izin	190 izin	136 %			
18.5.2.01	**Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota**	Jumlah perizinan yang dilakukan pengawasan			140 persen	190 persen	136 %			
18.5.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal			240 perus	220 perus	92 %			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.5.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimbingan penyusunan LKPM			40 perus	40 perus	100 %			
18.5.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengawasan perizinan penanaman modal			140 perus	190 perus	136 %			
18.6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	% perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan secara online			80 persen	86 persen	136 %			
18.6.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	% perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan secara online			80 persen	86 persen	108 %			
18.6.2.01.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi			1 apl	1 apl	100 %			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan terpadu. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2021, kinerja DPMPTSP Kabupten Sragen dapat digunakan untuk mengukur/ memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2023. Adapun capaian indikator pada tahun 2021 berdasarkan target renstra dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan promosi atau pameran investasi yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pameran dari target renstra 2 kali. Untuk tahun 2021 pelaksanaan even promosi dilakukan dua kali. Pelaksanaan even pameran/promosi ini dengan mengikuti pameran investasi di Kota Surakarta dan forum bisnis *Central Java Investment Forum* (CJIBF) yang dikoordinasikan oleh DMPTSP Provinsi Jawa Tengah.
2. Sebagai upaya peningkatan jumlah investor yang menanamkan modal di Kabupaten Sragen, DPMPTSP Kabupaten selain peningkatan promosi, juga melakukan upaya peningkatan pelayanan. Dengan peningkatan kegiatan-kegiatan tersebut di atas diharapkan jumlah investor semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah investor pada tahun 2021 jumlah investor yang sebanyak 6.072 dari target sebanyak 1.785 investor. Dari jumlah investor tersebut, diperoleh realisasi investasi sebesar dari Rp. 2,1 trilyun rupiah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1,98 trilyun rupiah.
3. Sepanjang tahun 2021 perizinan yang dilakukan pengaawasan sebanyak 190 izin dari target 140 pengawasan izin (135%). Hal ini mengalami peningkatan sebagai komitmen perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan perizinan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan di bidang perizinan.
4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditujukan kepada pengguna layanan/ pelaku usaha, dimana hasil dari penilaian akan menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, khususnya aparatur pelayaan perizinan dan nonperizinan. Hasil pelaksanaan survei adalah 86,50

dengan kategori Baik atau bernilai B. Adapun target IKM di tahun 2021 adalah 82,00.

5. Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko/ *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA), maka aplikasi OSS RBA digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. Selama tahun 2021 tercatat izin yang diproses melalui OSS maupun non OSS sebanyak 6.364 izin.

   Manfaat Penggunaan OSS RBA antara lain;

   - Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
   - Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time
   - Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat
   - Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)

6. Selain penggunaan OSS RBA, DPMPTSP Kabupaten Sragen juga memanfaatkan aplikasi perizinan *online* dengan nama Sistem Perizinan *Online* Sragen (SI PIONER). Aplikasi SI PIONER digunakan untuk pelayanan perizinan selain yang tercantum dalam kewenangan OSS RBA. Diharapkan pula semua jenis layanan yang menjadi kewenangan DPMPTSP yang tidak diakomodasi dalam OSS RBA, dapat dilayani melalui SI PIONER. Sampai dengan tahun 2021 86% jenis layanan perizinan/nonperizinan, yang selain yang tercantum dalam kewenangan OSS RBA, dapat dilayani secara *online* melalui SI PIONER. Hal ini telah mencapai target renstra

tahun 2021 sebesar 80%. Diharapkan tahun-tahun ke depan aplikasi ini dilakukan pengembangan demi penyempurnaan, sehingga diharapkan semua jenis layanan perizinan/nonperizinan (non OSS) dapat dilakukan secara *online.*

Tabel II.2

Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator	SPM	IKK/ IKU	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai investasi		√	1,87 trilyun rp	1,98 trilyun rp	2,10 trilyun rp	1,50 trilyun rp	1,98 trilyun rp	1,98 trilyun rp	2,1 trilyun rp	1,6 trilyun rp
2	Jumlah even promosi investasi			2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 Kali	2 kali
3	Kenaikan/ penurunan investasi		√	%	%	%	%	5,0 %	6,7 %	3,0 %	3,0 %
4	Jumlah investor		√	1.760 investor	1,735 investor	1,785 investor	1,250 investor	13.911 investor	6.072 investor	1.250 investor	1,313 investor
5	Jumlah perizinan yang dilakukan pengawasan			120 izin	140 izin	140 izin	90 izin	145 izin	145 izin	90 izin	90 izin
6	Indeks Kepuasan Masyarakat		√	81,00 poin	81.00 poin	82.00 poin	82,00	82,20 poin	86,50 poin	86,50 poin	86,50 poin
7	Prosentase perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan secara online			50 %	70 %	80 %		39 %	86 %	%	%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk penyelenggaraan tugas dimaksudkan, DPMPTSP Kabupaten Sragen mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

Selain itu tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yaitu pelayanan perizinan kepada masyarakat, dengan mudah, cepat, transparan, terpercaya dan berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, yaitu:

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   Upaya peningkatan penanaman modal dilakukan melalui penerbitan kebijakan di bidang penaman modal yang meliputi;

   - Penetapan Pemberian fasilitas/ insentif di Bidang Penanaman Modal; dan
   - Pembuatan Peta Potensi Investasi.

   Diharapkan dengan kebijakan ini terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi dan semakin mudahnya melakukan penanaman modal. Upaya untuk meningkatkan iklim investasi melalui peningkatan daya saing investasi daerah juga dilakukan melalui kebijakan deregulasi/ penyederhanaan peraturan di bidang investasi, baik menyangkut dissentif investasi maupun perizinan di bidang investasi.

2. Promosi Penanaman Modal

   Upaya peningkatan investasi melalui promosi investasi dan kerjasama investasi yang dilakukan dengan pihak instansi pemerintah, investor maupun pihak ketiga. Ruang promosi penanaman modal meliputi;

   - Penyusunan strategi promosi penanaman modal
   - Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Pelayanan Penanaman Modal

   Pelayanan Penanaman Modal merupakan upaya peningkatan pelayanan di bidang perizinan penanaman modal dengan mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan Penanaman Modal meliputi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

   Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu. Dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Disisi lain Pemerintah Daerah diberikan peluang untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS RBA sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Melalui OSS RBA pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Dengan demikian penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi pelaku usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Guna memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, maka keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sangat diperlukan. MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara/daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Sedangkan ruang lingkup pelayanan penanaman modal ini meliputi;

a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah :

a. Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan;
b. Melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
c. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, penggunaan fasilitas fiskal dan non fiskal serta melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.

Sasaran pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah tercapainya realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini meliputi kegiatan :

a. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal.
b. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penananam modal.
c. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penananam modal

5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

   Pelaksanaan program ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pengembangan aplikasi perizinan *online,* yang merupakan aplikasi pendukung OSS, digunakan untuk mendukung penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Dengan pengembangan aplikasi ini, maka seluruh kewenangan bidang perizinan/nonperizinan yang tidak terakomodasi pada OSS, juga dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan *online*. Dengan penerapan teknologi informasi, maka diharapkan hanya ada satu data dan tidak terjadi tumpang tindih seperti yang sering terjadi.

6. Isu penting lain di tahun 2023 pada Urusan Penanaman Modal adalah
   a. Rendahnya daya saing daerah;
   b. Belum optimalnya kewenangan pelayanan perizinan berusaha dan investasi;
   c. Belum optimalnya jumlah dan nilai investasi berskala nasional baik PMDN/PMA;
   d. Belum optimalnya pengawalan investasi.
   e. Pentingnya optimalisasi perlayanan terpadu dalam satu lokasi (mal pelayanan publik).

Agar tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai tentunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen perlu menyiapkan langkah-langkah strategis, yang akan dilaksanakan antara lain;

1. Pemangkasan alur birokrasi pelayanan dan penyederhanaan prosedur pelayanan di bidang perizinan dan investasi;
2. Peningkatan ketersediaan dokumen potensi sektor investasi, sehingga memudahkan bagi calon investor yang akan menanamkan modal;

3. Peningkatan iklim investasi dengan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal;
4. Meningkatkan promosi peluang dan potensi investasi di Kabupaten Sragen dengan mengikuti even dan forum pameran investasi;
5. Memberikan pelayanan dengan ramah, sopan serta mengembangkan inovasi layanan publik secara *mobile* sehingga mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna lebih meningkatkan kualitas layanan perizinan melalui OSS Berbasis Resiko (*Risk Based Aproach/ RBA)* dan peningkatan kapasitas petugas layanan;
7. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya aparatur pelayanan melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pendidikan latihan (diklat);
8. Meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP);
9. Meningkatkan sosialisasi kepada investor guna meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan di bidang penanaman modal baik terkait pelaksanaan usaha maupun dalam pelaporan (LKPM);
10. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan bidang perizinan penanaman modal melalui pembinaan dan pengawasan;
11. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi dalam penerapan satu pintu di bidang informasi dan data.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub Bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu: 1) membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2) penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan 3) penjelasan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2023, atau program/kegiatan/subkegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda.

Penjelasan pada bagian ini belum dapat disajikan karena hingga penyusunan Renja ini, Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2023 hanya menyajikan matrik program/ kegiatan sedangkan subkegiatan belum ditampilkan secara rinci.

Tabel. II.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN
Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	**Indikator**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu**	**Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan**	**Indikator**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		DPMPTSP		**8.032.858.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**		DPMPTSP		**7.057.740.345**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	DPMPTSP	100%	**6.105.858.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	DPMPTSP	100%	**5.625.752.845**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	DPMPTSP	3 dokumen	**19.858.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	DPMPTSP	3 dokumen	**3.783.000**	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	3 Dokumen	0	
					Koordinasi danPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	1 Laporan	3.783.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	DPMPTSP	12 bulan	**3.800.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	DPMPTSP	12 bulan	**3.380.906.790**	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	25Orang/bl	3.380.906.790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	DPMPTSP	2 laporan	**118.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	DPMPTSP	2 laporan	**78.673.409**	
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPMPTSP	38 Paket	30.685.000	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DPMPTSP	0	0	
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	0	0	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	40 Orang	47.988.409	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	DPMPTSP	12 bulan	**600.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	DPMPTSP	12 bulan	**602.655.000**	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 Paket	42.108.000	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	8 Paket	251.625.000	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	4 Paket	70.280.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP	4 Paket	121.425.000	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan	DPMPTSP	1 Dokumen	7.992.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	25 Laporan	75.000.000	
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	DPMPTSP	1 Dokumen	19.200.000	
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen	DPMPTSP	1 Dokumen	15.025.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	DPMPTSP	2 laporan	**388.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	DPMPTSP	2 laporan	**198.132.000**	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan	DPMPTSP	1 Unit	33.815.000	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DPMPTSP	4 Paket	99.337.000	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPMPTSP	28 Unit	64.980.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	DPMPTSP	12 bulan	**940.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	DPMPTSP	12 bulan	**1.083.198.245**	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	4 Laporan	5.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMPTSP	4 Laporan	471.272.000	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	4 Laporan	117.753.245	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	12 bulan	488.673.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	2 laporan	**240.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	2 laporan	**278.404.401**	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	DPMPTSP	3 Unit	54.150.000	
					Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMPTSP	12 Unit	111.217.000	
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	DPMPTSP	96 Unit	18.521.000	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMPTSP	4 Unit	20.850.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Pemeliharaan Aset Tetap L:ainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	DPMPTSP	1 Unit	34.915.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DPMPTSP	12 Unit	38.751.401	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	DPMPTSP	40%	**350.000.000**	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DPMPTSP	40%	**225.000.000**	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	DPMPTSP	2 dokumen	**150.000.000**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	DPMPTSP	2 dokumen	**0**	
					Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	0	0	
					Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	0	0	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah penyusunan peta potensi investasi	DPMPTSP	1 dokumen	**200.000.000**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	jumlah penyusunan peta potensi investasi	DPMPTSP	2 dokumen	**225.000.000**	
					Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	DPMPTSP	1 Dokumen	100.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	125.000.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar	DPMPTSP	20%	**430.000.000**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar	DPMPTSP	20%	**150.000.000**	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi	DPMPTSP	2 kali	**430.000.000**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah even promosi	DPMPTSP	2 kali	**150.000.000**	
					Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	0	
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	150.000.000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	DPMPTSP	83 poin	**530.000.000**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	DPMPTSP	83 poin	**544.114.500**	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	DPMPTSP	100%	**530.000.000**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	DPMPTSP	100%	**544.114.500**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	3200 Pelaku usaha	143.778.000	
					Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPTSP	1100 Kegiatan usaha	230.211.500	
					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP	80 orang	70.125.000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP	150 Kegiatan usaha	100.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	DPMPTSP	10%	**477.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	DPMPTSP	10%	**402.873.000**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DPMPTSP	100%	**477.000.000**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DPMPTSP	100%	**402.873.000**	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	60 Kegiatan	54.000.000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	150 Pelaku	254.873.000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	100 Kegiatan	94.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	DPMPTSP	40%	**140.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	DPMPTSP	40%	**110.000.000**	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan	DPMPTSP	40%	**140.000.000**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyediaan data informasi perizinan/ nonperizinan	DPMPTSP	40%	**110.000.000**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah aplikasi Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	DPMPTSP	1 Dokumen	110.000.000	
				8.032.858.000					**7.057.740.345**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, guna mencapai tujuan dan sasaran. Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, dan perguruan tinggi. Deskripsi yang perlu disajikan antara lain: 1) penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; dan 2) penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, masyarakat dapat mengusulkan melalui proses musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) baik pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran strategis perangkat daerah. Namun demikian untuk sejak rencana kerja tahun 2023 disusun, tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Mengingat tahun 2023 adalah tahun pertama periode pelaksanaan Renstra 2021-2026, dan dokumen Renstra belum ada maka program/kegiatan/subkegiatan yang disusun berdasarkan rancangan awal RKPD. Tdak semua program dan kegiatan dapat diakomodir, karena keterbatasan anggaran yang disediakan. Dengan menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, maka tahun 2023 program yang dijalankan sebanyak 6 (enam) program, dan kegiatan yang dijalankan sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan renja harus menelaah kebijakan dan program prioritas nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah.

Strategi pembangunan nasional tahun 2020-2024 tertuang dalam 7 agenda pembangunan nasional, yaitu:

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi. Kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu: (1) perbaikan kualitas SDM; (2) Peningkatan investasi; (3) Peningkatan produktivitas; dan (4) perbaikan pasar tenaga kerja.
b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah;
c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja;
e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
g. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan pembangunan provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, menurut RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, ditujukan pada "**Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari**", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

a. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
b. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
c. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal saerah.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah "**Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera dan berbudaya dengan semangat gotong royong**". Misi yang ditempuh guna mewujudkan visi tahun 2021-2026 tersebut adalah:

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
b. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.
c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Investasi dan ketahanan pangan.
d. Penanganan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
e. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2023 berpedaoman pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 Tahap IV (2020 – 2025). Dalam rangka mendukung terwujudnya visi terakhir RPJPD Kabupaten Sragen serta semakin pentingnya tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih *(good governance and clean government)*, tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 yaitu **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan good governance dalam meningkatkan pelayanan publik yang prima"** dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebagai berikut.;

a. Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi
b. Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat.
c. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.
d. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.
e. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui kegiatan tahunan. Rencana strategis memuat target indikator kinerja tingkat sasaran srategis untuk masing-masing perangkat daerah. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukan kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Ukuran keberhasilan dinyatakan dalam angka capaian realisasi atas indikator-indikator kinerja yang berorientasi indikator kinerja tujuan.

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2023, yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
DPMPTSP Tahun 2023

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal (trilyun rupiah)	1,55	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN (investor)	1.313
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (predikat)	BB (70,30)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (predikat)	BB (70,30)

3.3. Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program/kegiatan/subkegiatan di tahun 2023 antara lain;

Tabel III.2
Program/Kegiatan/Subkegiatan
DPMPTSP Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	2	3	4
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1	2	3	4
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

1	2	3	4
3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel III.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HASIL ANALISA KEBUTUHAN					PRAKIRAAN TAHUN 2024		
Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	**Indikator**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu**	**Indikator**	**target**	**Pagu**
1	2	3	4	**5**	**6**	**7**	**8**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		DPMPTSP		**7.057.740.345**			**7.896.631.000**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	DPMPTSP	100%	**5.625.752.845**	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	**6.012.631.000**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	DPMPTSP	3 dokumen	**3.783.000**	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	3 dokumen	**12,000,000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	3 Dokumen	0	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6,000,000
Koordinasi danPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	1 Laporan	3.783.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	DPMPTSP	12 bulan	**3.380.906.790**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3,875,000,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	25Orang/ bl	3.380.906.790	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25Orang/ bl	3,875,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	DPMPTSP	2 laporan	**78.673.409**	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 laporan	**41,000,000**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPMPTSP	38 Paket	30.685.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DPMPTSP	0	0	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	16,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	0	0	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	40 Orang	47.988.409	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	25,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	DPMPTSP	12 bulan	**602.655.000**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	**674,000,000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 Paket	42.108.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	50,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	8 Paket	251.625.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	200,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	4 Paket	70.280.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	120,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP	4 Paket	121.425.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	160,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan	DPMPTSP	1 Dokumen	7.992.000	Jumlah Dokumen Bahan	1 Dokumen	4,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	25 Laporan	75.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	110,000,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen	19.200.000	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15,000,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	DPMPTSP	1 Dokumen	15.025.000	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 Dokumen	16,000,0000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	DPMPTSP	2 laporan	**198.132.000**	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	2 laporan	**90,000,000**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan	DPMPTSP	1 Unit	33.815.000	Jumlah Unit Kendaraan	0 Unit	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DPMPTSP	4 Paket	99.337.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	30,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPMPTSP	28 Unit	64.980.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	60,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	DPMPTSP	12 bulan	**1.083.198.245**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	**935,000,000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	4 Laporan	5.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMPTSP	4 Laporan	471.272.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	450,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	4 Laporan	117.753.245	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	130,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	12 bulan	488.673.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	350,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	2 laporan	**278.404.401**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	**280,631,000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	DPMPTSP	3 Unit	54.150.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	53,000,000
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMPTSP	12 Unit	111.217.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	110,000,000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	DPMPTSP	96 Unit	18.521.000	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	14,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMPTSP	0	0	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	20,000,000
Pemeliharaan Aset Tetap L:ainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	DPMPTSP	4 Unit	20.850.000	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	11,131,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DPMPTSP	1 Unit	34.915.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	32,500,000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DPMPTSP	47 unit	38.751.401	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	28	40,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	DPMPTSP	40%	**225.000.000**	**persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun (%)**	40%	**370,000,000**
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	DPMPTSP	2 dokumen	**0**	jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	2 dokumen	150,000,000
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	0	0	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 dokumen	100,000,000
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	0	0	Jumlah Kegiatan Usaha dari Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 kegiatan	50,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah penyusunan peta potensi investasi	DPMPTSP	2 dokumen	**225.000.000**	jumlah penyusunan peta potensi investasi	2 dokumen	220,000,000
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	DPMPTSP	1 Dokumen	100.000.000	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 Dokumen	120,000,000
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	125.000.000	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar	DPMPTSP	20%	**150.000.000**	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar	20%	**430,000,000**
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi	DPMPTSP	2 kali	**150.000.000**	jumlah even promosi	2 kali	430,000,000
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	0	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	180,000,000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	150.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	250,000,000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	DPMPTSP	83 poin	**544.114.500**	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	83 poin	**570,000,000**
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	DPMPTSP	100%	**544.114.500**	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	100%	**570,000,000**
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	1.250 Pelaku usaha	143.778.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1250 Pelaku usaha	200,000,000
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPTSP	500 Kegiatan usaha	230.211.500	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	500 Kegiatan usaha	220,000,000
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP	80 orang	70.125.000	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	80 orang	50,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP	150 Kegiatan usaha	100.000.000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	150 Kegiatan usaha	100,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	DPMPTSP	10%	**402.873.000**	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	10%	**484,000,000**
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DPMPTSP	100%	**402.873.000**	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	**484,000,000**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	60 Kegiatan	54.000.000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Kegiatan	94.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	150 Pelaku	254.873.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 Pelaku	290.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	100 Kegiatan	94.000.000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	100 Kegiatan	100,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	DPMPTSP	40%	**110.000.000**	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	50%	**30,000,000**
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/ nonperizinan	DPMPTSP	40%	**110.000.000**	Persentase penyediaan data informasi perizinan/ nonperizinan	50%	30,000,000
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah aplikasi Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	DPMPTSP	1 Dokumen	110.000.000	jumlah aplikasi Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	30,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Sragen tahun 2023 dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran renja, visi dan misi Kabupaten Sragn yang tertuang dalam RKPD. Program kerja utama DPMPTSP Kabupaten Sragen sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Sragen adalah:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian dan Pelaksnaaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab DPMPTSP dalam evaluasi RKPD dan LKPJ. Dalam Renja DPMPTSP Tahun 2023 terdapat 6 program, 12 kegiatan dan 41 subkegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh program/kegiatan/subkegiatan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai berikut;

Tabel IV.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Sasaran Program Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18				**URUSAN PENANAMAN MODAL**								**7.057.740.345**	
2	18	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5.625.752.845**	
2	**18**	**001**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**3.783.000**	
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	persentase dokumen perencanaan dan evaluasi	100 %	Sragen	3.783.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**18**	**001**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.380.906.790**	
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	persentase administrasi keuangan	100 %	Sragen	3.380.906.790	
2	**18**	**001**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**78.673.409**	
2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	persentase administrasi kepegawaian	100 %	Sragen	30.685.000	
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	persentase administrasi kepegawaian	100 %	Sragen	47.988.409	
2	**18**	**001**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**602.655.000**	
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	persentase administrasi umum perangkat daerah	100 %	Sragen	42.108.000	
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	persentase administrasi umum perangkat daerah	100 %	Sragen	251.625.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	persentase administrasi umum perangkat daerah	100 %	Sragen	70.280.000	
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	persentase administrasi umum perangkat daerah	100 %	Sragen	121.425.000	
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	persentase administrasi umum perangkat daerah	100 %	Sragen	7.992.000	
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	persentase administrasi umum perangkat daerah	100 %	Sragen	75.000.000	
2	18	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	persentase administrasi umum perangkat daerah	100 %	Sragen	19.200.000	
2	18	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	persentase administrasi umum perangkat daerah	100 %	Sragen	15.025.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**18**	**001**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**198.132.000**	
2	18	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	persentase pengadaan BMD	100 %	Sragen	33.815.000	
2	18	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 paket	persentase pengadaan BMD	100 %	Sragen	99.337.000	
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28 Unit	persentase pengadaan BMD	100 %	Sragen	64.980.000	
2	**18**	**001**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.083.198.245**	
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100 %	Sragen	5.500.000	
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100 %	Sragen	471.272.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100 %	Sragen	117.753.245	
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100 %	Sragen	488.673.000	
2	**18**	**001**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**278.404.401**	
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	persentase pemeliharaan BMD	100 %	Sragen	54.150.000	
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	persentase pemeliharaan BMD	100 %	Sragen	111.217.000	
2	18	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	96 Unit	persentase pemeliharaan BMD	100 %	Sragen	18.521.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	persentase pemeliharaan BMD	100 %	Sragen	20.850.000	
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	persentase pemeliharaan BMD	100 %	Sragen	34.915.000	
2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	47 Unit	persentase pemeliharaan BMD	100 %	Sragen	38.751.401	
2	18	2			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**								**225.000.000**	
2	**18**	**002**	2.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**								**225.000.000**	
2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	40 %	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	ketersediaan data potensi investasi	2 dokumen	Sragen	100.000.000	
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	40 %	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	ketersediaan data potensi investasi	2 dokumen	Sragen	125.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	3			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**								**150.000.000**	
2	**18**	**003**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**150.000.000**	
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar	20 %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	persentase even promosi	20 %	Sragen	150.000.000	
2	18	4			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**								**544.114.500**	
2	**18**	**004**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**								**544.114.500**	
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	83 poin	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1200 Pelaku Usaha	perizinan dan nonperizinan terlayani	100 %	Sragen	143.778.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	83 poin	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	500 Kegiatan Usaha	perizinan dan nonperizinan terlayani	100 %	Sragen	230.211.500	
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	83 poin	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	93 Orang	perizinan dan nonperizinan terlayani	100 %	Sragen	70.125.000	
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	83 poin	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	150 Kegiatan Usaha	perizinan dan nonperizinan terlayani	100 %	Sragen	100.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	5			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**								**402.873.000**	
2	**18**	**005**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**402.873.000**	
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	10 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Kegiatan Usaha.	terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	100 %	Sragen	54.000.000	
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	10 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 Pelaku Usaha	terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	100 %	Sragen	254.873.000	
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	10 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	100 %	Sragen	94.000.000	
2	18	6			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		40 %				40 %		**110.000.000**	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**18**	**006**	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		40 %				40 %		**110.000.000**	
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	40 %	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	cakupan data informasi perizinan dan nonperizinan	80%	Sragen	110.000.000	
JUMLAH													**7.057.740.345**	

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja ini disusun berisikan program/ kegiatan/ subkegiatan sebagai pedoman rencana kinerja untuk tahun 2023. Renja ini merupakan tolok ukur untuk menentukan program/ kegiatan/ subkegiatan perangkat daerah tahun 2023.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan petunjuk teknis.
2. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja SKPD, mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas.
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif, sehingga, apabila terjadi kekurangan anggaran, maka dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan diupakayan tetap dapat mendukung pencapaian target kinerja.

Rencana Kerja ini disusun dengan menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam RKPD Tahun 2023 dan RENSTRA Tahun 2021-2026.

Besar harapan kami agar dokumen renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah daerah. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat

kami harapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusunan rencana kerja ke depan.

Demikian Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2023 ini disusun dengan harapan semoga segala yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sragen, Juni 2022

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan



TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Sukowati No.255 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id
S R A G E N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 800/667/29/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragenh Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63);
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022

Kabupaten Sragen Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22-07-2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

Salinan disampaikan kepada Yth.:
1. Inspektur Kab. Sragen;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kab. Sragen;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Sragen;
5. Arsip.